

UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENUNTASKAN PERBUATAN MASYARAKAT YANG MENGHALANGI PENGANGKUT KONTAINER MELINTAS DI JALAN UMUM

David Parasian Simangunsong¹, Jinner Sidauruk²

^{1,2} Universitas HKBP Nomensen

davidparasian.simangunsong@student.uhn.ac.id¹, jinnersidauruk@uhn.ac.id²

ABSTRACT; *This study aims to examine the police efforts in addressing actions by the public that obstruct container transport on public roads. This issue arises due to high traffic volume and disregard for traffic regulations, disrupting the smooth and safe passage of container vehicles. The research adopts a qualitative approach using a case study method, where data is collected through interviews with police officers, truck drivers, and local communities, as well as document analysis. The findings reveal that the police have implemented various measures such as regular patrols, enforcement of violations, and public awareness campaigns regarding traffic regulations. However, challenges remain, such as a lack of public awareness and limited resources. Therefore, cooperation between the police, relevant agencies, and the community is essential to find more effective solutions to this issue.*

Keywords: *Police, Container Transport, Public Roads, Enforcement, Awareness.*

ABSTRAK; Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji upaya kepolisian dalam menuntaskan perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer melintas di jalan umum. Permasalahan ini timbul akibat tingginya volume lalu lintas dan pengabaian terhadap aturan lalu lintas yang berlaku, sehingga mengganggu kelancaran dan keselamatan pengangkut kontainer. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, dimana data dikumpulkan melalui wawancara dengan aparat kepolisian, pengemudi truk, dan masyarakat sekitar, serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepolisian telah melakukan berbagai upaya seperti patroli rutin, penindakan terhadap pelanggaran, serta sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya aturan lalu lintas. Namun, masih terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara kepolisian, instansi terkait, dan masyarakat untuk menciptakan solusi yang lebih efektif dalam menanggulangi masalah ini.

Kata Kunci: Kepolisian, Pengangkut Kontainer, Jalan Umum, Penindakan, Sosialisasi.

PENDAHULUAN

Transportasi menjadi salah satu sektor penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat bergantung pada sistem transportasi untuk mendistribusikan barang dari satu daerah ke daerah lainnya. Salah satu bentuk transportasi barang yang paling dominan adalah transportasi darat melalui truk angkutan, termasuk truk pengangkut kontainer. Kontainer merupakan wadah besar yang digunakan untuk mengangkut berbagai barang, baik untuk pasar domestik maupun internasional, sehingga kelancaran pengangkutan kontainer di jalan umum menjadi krusial untuk mendukung perekonomian negara. Oleh karena itu, setiap gangguan terhadap kelancaran pengangkutan kontainer harus ditanggapi secara serius, salah satunya adalah tindakan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer melintas di jalan umum.

Fenomena penghalangan pengangkut kontainer di jalan umum bukanlah hal yang baru di Indonesia. Berbagai peristiwa penghalangan, baik dalam bentuk blokade jalan, unjuk rasa, hingga aksi kekerasan terhadap sopir atau kendaraan pengangkut kontainer, telah beberapa kali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Tindakan ini dapat beragam, mulai dari pemblokiran jalan raya untuk menghentikan atau memperlambat pergerakan truk pengangkut kontainer, hingga protes yang disertai dengan kekerasan atau ancaman terhadap sopir dan perusahaan yang mengoperasikan kendaraan tersebut. Penyebab dari tindakan penghalangan ini sering kali berkaitan dengan berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik, seperti sengketa lahan, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, atau protes terhadap ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok masyarakat tertentu.

Contoh dari peristiwa penghalangan pengangkut kontainer yang paling sering terjadi adalah yang melibatkan warga yang merasa dirugikan oleh keberadaan truk pengangkut kontainer yang melintas di jalan-jalan yang mereka anggap tidak sesuai untuk angkutan berat. Misalnya, warga yang tinggal di sekitar jalan yang dilalui oleh truk pengangkut kontainer sering kali mengeluhkan kerusakan jalan, polusi udara, serta ancaman keselamatan yang ditimbulkan akibat lalu lintas kendaraan besar tersebut. Beberapa warga atau kelompok masyarakat yang merasa tidak puas kemudian melakukan aksi penghalangan dengan cara memblokir jalan, yang mengakibatkan terganggunya aktivitas distribusi barang di wilayah tersebut. Meskipun terkadang aksi penghalangan ini dilakukan dengan alasan yang dapat dimengerti, cara-cara tersebut jelas melanggar hak-hak orang lain, termasuk hak untuk mendapatkan akses transportasi yang aman dan lancar.

Selain itu, di beberapa daerah, penghalangan pengangkut kontainer terjadi karena adanya ketegangan sosial atau perselisihan antara masyarakat dengan perusahaan angkutan barang. Perusahaan angkutan yang tidak memberikan kompensasi kepada masyarakat yang terdampak oleh kerusakan jalan atau dampak lainnya yang ditimbulkan oleh aktivitas transportasi mereka sering kali menjadi sasaran aksi protes yang berujung pada penghalangan pengangkut kontainer. Fenomena semacam ini mengarah pada perlunya penanganan yang tepat dan tegas dari aparat kepolisian untuk menanggulangi perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum dan mengancam stabilitas sosial di masyarakat.

Kepolisian, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban dan keamanan di masyarakat, memiliki peran yang sangat penting dalam menanggulangi dan menuntaskan perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer melintas di jalan umum. Sebagai aparat penegak hukum, polisi tidak hanya berfungsi sebagai penindak bagi pelaku pelanggaran, tetapi juga sebagai mediator yang dapat mengarahkan pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa menuju penyelesaian yang damai dan adil. Dalam konteks penghalangan pengangkut kontainer, upaya kepolisian harus mencakup berbagai langkah, mulai dari pencegahan hingga penindakan hukum yang tegas terhadap pelaku.

Namun, upaya kepolisian dalam menangani perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer melintas di jalan umum tidak selalu berjalan mulus. Terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi oleh pihak kepolisian, baik dari segi sumber daya manusia, sarana dan prasarana, hingga faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi dinamika di lapangan. Selain itu, masalah hukum yang kompleks, seperti penyelesaian sengketa lahan, dapat memperumit penanganan kasus-kasus penghalangan tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai keberhasilan dalam menuntaskan masalah ini, dibutuhkan kolaborasi yang efektif antara kepolisian, pemerintah daerah, perusahaan angkutan barang, dan masyarakat.

Di sisi lain, tantangan dalam penegakan hukum juga terkait dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga kelancaran lalu lintas dan pengertian tentang hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak. Banyak masyarakat yang merasa bahwa penghalangan pengangkut kontainer adalah bentuk perjuangan untuk hak mereka, meskipun tindakan tersebut dapat merugikan banyak pihak. Oleh karena itu, pendidikan hukum dan kesadaran akan konsekuensi hukum dari tindakan penghalangan sangat penting untuk mencegah terjadinya konflik yang lebih besar.

Tulisan ini bertujuan untuk membahas lebih dalam mengenai upaya kepolisian dalam menuntaskan perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer melintas di jalan umum, dengan melihat berbagai aspek hukum, sosial, dan praktis yang terkait. Pembahasan ini akan mencakup faktor-faktor yang mendorong munculnya tindakan penghalangan, peran kepolisian dalam mengatasi permasalahan ini, serta berbagai tantangan yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas mereka. Selain itu, tulisan ini juga akan membahas solusi dan rekomendasi yang dapat diterapkan dalam rangka menciptakan sistem transportasi yang lebih aman dan tertib di Indonesia.

Diharapkan melalui penelitian ini, dapat ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai upaya-upaya yang dapat dilakukan oleh kepolisian dalam menangani perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer, serta memberikan kontribusi dalam pengembangan kebijakan yang lebih baik dalam mengelola masalah transportasi dan ketertiban umum di Indonesia. Penanganan yang tepat terhadap masalah ini bukan hanya akan menciptakan kondisi yang lebih kondusif bagi kelancaran distribusi barang, tetapi juga akan memperkuat rasa keadilan dan kepatuhan terhadap hukum di masyarakat, serta meningkatkan hubungan yang lebih harmonis antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan sektor swasta.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam jurnal ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat melakukan penghalangan terhadap pengangkut kontainer yang melintas di jalan umum, serta apa alasan sosial, ekonomi, atau politik yang mendorong tindakan penghalangan tersebut?
2. Bagaimana peran kepolisian dalam menanggulangi perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer melintas di jalan umum?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menuntaskan perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer di jalan umum?
4. Apa solusi atau rekomendasi yang dapat diterapkan untuk mencegah terjadinya penghalangan pengangkut kontainer di jalan umum di masa depan?

Rumusan masalah ini diharapkan dapat memberikan arah yang jelas dalam membahas upaya kepolisian dalam menuntaskan perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer, serta memberikan gambaran tentang berbagai faktor yang mempengaruhi permasalahan ini dan cara-cara penyelesaian yang tepat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif untuk menggambarkan upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menangani masyarakat yang menghalangi pengangkutan container di jalan umum. Penelitian ini dilaksanakan di beberapa wilayah yang rawan terjadinya penghalangan pengangkutan container, seperti kawasan industri dan jalan utama di kota-kota besar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik analisis isi untuk menggali informasi mengenai factor-faktor yang menyebabkan masyarakat menghalangi pengangkutan kontainer serta upaya kepolisian dalam menyelesaikan masalah tersebut

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia terus berkembang seiring dengan upaya pemerintah untuk memajukan perekonomian dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Salah satu sektor yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian adalah sektor transportasi, yang menjadi penghubung utama antara daerah penghasil barang dengan pasar domestik dan internasional. Dalam konteks ini, angkutan barang, khususnya melalui jalan raya, memegang peranan penting dalam mendukung kelancaran distribusi barang antar wilayah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Menimbang : a. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. bahwa Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah; Ini merupakan salah satu bentuk penegakan hukum terhadap ketertiban lalu lintas di Indonesia.

Namun, meskipun jalan raya merupakan jalur utama transportasi barang, sering kali terjadi kendala yang menghambat kelancaran lalu lintas, salah satunya adalah perbuatan masyarakat yang sengaja menghalangi atau menghambat pengangkut kontainer. Hal ini tidak hanya merugikan sektor transportasi dan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban umum. Adanya tindakan masyarakat yang menghalangi

pengangkut kontainer untuk melintas di jalan umum menjadi fenomena yang memerlukan perhatian serius, baik dari pihak pemerintah, aparat penegak hukum, maupun masyarakat itu sendiri.

Fenomena penghalangan pengangkut kontainer ini sering kali terjadi dalam konteks sengketa lahan, ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, atau bahkan sebagai bentuk protes terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi. Bentuk penghalangan ini dapat berupa aksi demonstrasi, blokade jalan, atau bahkan aksi kekerasan yang bertujuan untuk menghentikan atau memperlambat pergerakan truk pengangkut kontainer. Akibat dari perbuatan tersebut, tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi yang signifikan, tetapi juga dapat mengganggu ketertiban dan merusak hubungan sosial antar pihak yang terlibat.

Dalam konteks ini, peran kepolisian sebagai aparat penegak hukum sangatlah vital. Sebagai institusi yang memiliki kewenangan dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat, kepolisian berperan untuk memastikan bahwa segala bentuk tindakan yang merugikan kepentingan umum dapat ditangani secara tepat dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Oleh karena itu, upaya kepolisian dalam menuntaskan perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer menjadi sangat penting untuk dibahas. Penegakan hukum yang efektif dalam situasi seperti ini bukan hanya berfungsi untuk menindak pelaku penghalangan, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan mencegah terjadinya perbuatan serupa di masa depan.

Penegakan hukum yang efektif tidak hanya membutuhkan tindakan represif, tetapi juga pendekatan preventif yang dapat mencegah timbulnya tindakan serupa. Dalam hal ini, peran polisi dalam mengedukasi masyarakat, berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait, dan menjalankan peran mediasi juga sangat penting. Sebagai lembaga yang dipercaya untuk menjaga kedamaian, polisi diharapkan tidak hanya menjadi penindak, tetapi juga pemimpin dalam menciptakan dialog yang konstruktif antara masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam proses distribusi barang.

Namun demikian, upaya kepolisian untuk menuntaskan perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkut kontainer melintas di jalan umum tidaklah tanpa tantangan. Berbagai faktor, mulai dari resistensi masyarakat, keterbatasan sumber daya, hingga kompleksitas hukum yang ada, dapat menjadi hambatan dalam menjalankan tugas kepolisian dengan efektif. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan penegakan hukum yang optimal, dibutuhkan

pendekatan yang holistik, melibatkan kolaborasi antara pihak kepolisian, pemerintah daerah, pihak swasta, dan masyarakat itu sendiri.

Penghalangan terhadap pengangkut kontainer yang melintas di jalan umum seringkali terjadi akibat berbagai faktor yang melibatkan dimensi sosial, ekonomi, dan politik. Berikut adalah beberapa faktor utama yang dapat menyebabkan masyarakat melakukan penghalangan terhadap pengangkut kontainer tersebut, beserta penjelasan berdasarkan fakta yang relevan:

1. Kerusakan Infrastruktur Jalan

- Faktor Sosial & Ekonomi

Salah satu alasan utama penghalangan adalah kerusakan yang ditimbulkan oleh angkutan kontainer yang seringkali terlalu berat untuk infrastruktur jalan yang ada. Kontainer berukuran besar dan sangat berat dapat menyebabkan kerusakan pada jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, yang berdampak langsung pada kenyamanan dan keselamatan warga sekitar.

- Alasan Sosial

Masyarakat merasa terganggu karena kerusakan jalan menghambat mobilitas sehari-hari, meningkatkan waktu tempuh, dan menambah risiko kecelakaan. Masyarakat mungkin merasa bahwa mereka tidak mendapatkan perhatian atau solusi yang memadai dari pihak berwenang untuk memperbaiki kondisi ini.

2. Polusi Udara dan Suara

- Faktor Sosial & Ekonomi

Kendaraan pengangkut kontainer sering kali menghasilkan polusi udara dan suara yang tinggi. Di daerah padat penduduk, suara bising dan polusi gas buang dari truk-truk besar dapat mengganggu kualitas hidup masyarakat sekitar. Hal ini terutama dirasakan oleh kelompok masyarakat yang tinggal dekat dengan jalur transportasi utama.

- Alasan Sosial

Masyarakat yang terpapar langsung merasa kualitas hidup mereka menurun akibat polusi tersebut. Ketidaknyamanan ini bisa menambah ketegangan dan menyebabkan mereka melakukan protes berupa penghalangan jalur atau kendaraan pengangkut.

3. Penyumbatan Jalan dan Kemacetan

- Faktor Ekonomi

Truk kontainer yang melintas di jalan umum seringkali menyebabkan kemacetan lalu lintas, terutama di daerah perkotaan atau jalur-jalur yang sudah padat. Hal ini mengganggu kegiatan ekonomi masyarakat yang bergantung pada kelancaran transportasi untuk aktivitas sehari-hari, seperti distribusi barang atau transportasi orang.

- Alasan Ekonomi

Masyarakat merasa terganggu karena kemacetan yang disebabkan oleh truk kontainer menghambat kegiatan ekonomi lokal. Waktu tempuh yang lebih lama berarti produktivitas yang lebih rendah, dan biaya tambahan untuk transportasi juga meningkat.

4. Kurangnya Penegakan Hukum

- Faktor Politik & Sosial

Di beberapa tempat, penghalangan terhadap truk pengangkut kontainer dilakukan karena masyarakat merasa bahwa pemerintah atau aparat penegak hukum tidak cukup tegas dalam mengatur lalu lintas angkutan berat di jalan umum. Mereka merasa bahwa perusahaan pengangkut kontainer atau pihak yang bertanggung jawab tidak mematuhi aturan tentang waktu dan rute yang tepat bagi kendaraan besar.

- Alasan Politik & Sosial

Masyarakat merasa bahwa mereka tidak dilindungi atau tidak diperhatikan dalam hal penegakan aturan dan regulasi. Oleh karena itu, penghalangan menjadi bentuk protes untuk menuntut perhatian dan perubahan dari pemerintah atau pihak terkait.

5. Pengabaian Terhadap Kepentingan Masyarakat Lokal

- Faktor Sosial & Politik

Dalam banyak kasus, kebijakan transportasi yang diterapkan tidak memperhitungkan kepentingan masyarakat lokal yang terdampak langsung. Masyarakat merasa bahwa kebijakan yang ada lebih berpihak pada kepentingan industri besar, sementara dampak negatif terhadap mereka dibiarkan begitu saja.

- Alasan Sosial & Politik

Ketika pemerintah atau perusahaan pengangkut tidak melibatkan atau mendengarkan aspirasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait rute dan operasional kontainer, masyarakat sering kali merasa tidak ada jalan lain selain melakukan aksi protes, seperti penghalangan.

6. Ketimpangan Pembangunan Infrastruktur

- Faktor Sosial & Ekonomi

Ketimpangan pembangunan infrastruktur antara daerah pusat ekonomi dan daerah perifer dapat memperburuk kondisi ini. Sering kali, jalan-jalan yang digunakan oleh truk pengangkut kontainer belum dipersiapkan untuk menampung volume dan berat angkutan besar.

- Alasan Ekonomi & Sosial

Masyarakat di daerah dengan infrastruktur yang kurang berkembang merasa terabaikan dan tertekan oleh keputusan yang menguntungkan pihak pengangkut dan pengusaha besar, tanpa memperhatikan kerugian sosial dan ekonomi yang mereka alami.

7. Kekurangan Sosial dan Keadilan dalam Pengelolaan Sumber Daya

- Faktor Sosial

Di beberapa daerah, masyarakat merasa bahwa keuntungan dari aktivitas ekonomi yang melibatkan angkutan kontainer tidak dirasakan oleh mereka. Misalnya, daerah yang menjadi jalur transportasi mungkin tidak mendapatkan manfaat yang sebanding, seperti pembangunan infrastruktur atau pengurangan dampak negatif dari kegiatan transportasi tersebut.

- Alasan Sosial

Ketidakadilan distribusi keuntungan dari sektor ekonomi ini bisa memicu ketegangan dan mendorong masyarakat untuk melakukan penghalangan sebagai bentuk tuntutan akan keadilan sosial dan ekonomi.

8. Kurangnya Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat

- Faktor Sosial & Politik

Jika pemerintah atau perusahaan pengangkut kontainer tidak melakukan sosialisasi yang baik kepada masyarakat tentang rencana atau kebijakan yang berkaitan dengan

transportasi berat, hal ini dapat menimbulkan ketidakpahaman dan ketidaksetujuan dari masyarakat.

- Alasan Sosial & Politik

Masyarakat yang merasa diabaikan atau tidak dilibatkan dalam perencanaan kebijakan terkait transportasi berat mungkin merasa terpaksa mengambil tindakan untuk menyuarakan ketidakpuasan mereka, salah satunya dengan melakukan penghalangan.

9. Pengaruh Isu Lingkungan

- Faktor Sosial & Politik

Isu-isu lingkungan seperti kerusakan lingkungan hidup atau dampak terhadap kesehatan masyarakat sering kali menjadi alasan utama di balik penghalangan terhadap pengangkut kontainer. Kontainer yang mengangkut barang dalam jumlah besar dan sering melintas dapat memperburuk kondisi lingkungan, seperti polusi udara dan kerusakan ekosistem lokal.

- Alasan Sosial & Politik

Jika masyarakat merasa bahwa kebijakan transportasi tidak mengindahkan prinsip keberlanjutan atau tidak memperhatikan dampak lingkungan, mereka mungkin melakukan penghalangan untuk menyuarakan kekhawatiran tersebut.

Tindakan penghalangan terhadap pengangkut kontainer di jalan umum seringkali merupakan respons terhadap kombinasi faktor sosial, ekonomi, dan politik. Masyarakat merasa dirugikan atau tidak diperlakukan dengan adil dalam aspek ekonomi, infrastruktur, atau lingkungan hidup. Solusi untuk mengatasi masalah ini memerlukan pendekatan yang holistik, termasuk perbaikan infrastruktur, pengawasan lebih ketat terhadap transportasi berat, serta keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan yang mempengaruhi kehidupan mereka.

Pihak kepolisian memiliki peranan yang sangat penting dalam menanggulangi perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkutan container yang melintas di jalan umum yaitu untuk menjaga ketertiban dan keamanan serta kelancaran lalu lintas. Kepolisian memiliki tugas untuk menegakkan hukum terhadap mereka yang melakukan tindakan menghalangi atau mengganggu pengangkutan container, baik melalui tindakan kriminal atau pelanggaran lalu

lintas. Tindakan seperti pemblokiran jalan atau penghalangan arus lalu lintas dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Selain dari penegakan hukum pihak kepolisian juga memiliki peran lain untuk menanggulangi perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkutan kontainer yang melintas di jalan umum, misalnya

1. Pengaturan lalu lintas

Kepolisian bertanggung jawab untuk mengatur dan mengarahkan lalu lintas agar pengangkutan container dapat berlangsung dengan lancar, termasuk pengawasan di titik-titik rawan kemacetan atau yang sering terjadinya gangguan dari masyarakat.

2. Pencegahan konflik

Kepolisian berperan untuk menghindari terjadinya konflik antara pengangkut container dan masyarakat yang mungkin merasa terganggu oleh proses pengangkutan, hal ini bisa dilakukan melalui pendekatan persuasif, koordinasi dengan masyarakat, dan memberikan sosialisasi mengenai pentingnya kelancaran lalu lintas bagi kepentingan bersama.

3. Pengawasan dan pengamanan

Dalam beberapa kasus, pengangkut container yang melintas di jalur-jalur tertentu memerlukan pengawasan polisi untuk memastikan perjalanan mereka aman dan tidak terganggu. Kepolisian dapat menyediakan pengawasan khusus, terutama di wilayah yang rawan gangguan.

4. Penyidikan dan tindak lanjut

Jika terjadi insiden yang melibatkan penghalangan pengangkutan container, kepolisian berperan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pihak yang terlibat. Mereka akan mengumpulkan bukti, memeriksa saksi, dan menindaklanjuti kasus sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian, kepolisian berperan dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran pengangkutan barang di jalan raya, serta memastikan bahwa tindakan yang menghalangi hak orang lain untuk melakukan aktivitasnya tidak dibiarkan tanpa sanksi. Tentu dalam melaksanakan tugasnya pihak kepolisian tidak terlepas dari yang namanya tantangan dalam menuntaskan perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkutan container yang melintas di jalan umum. Salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negatif dari aksi tersebut terhadap kelancaran lalu lintas. Banyak warga yang mungkin tidak

memahami pentingnya kelancaran transportasi kontainer untuk perekonomian nasional, sehingga mereka seringkali terlibat dalam tindakan menghalangi jalan, seperti melakukan pemblokiran atau menciptakan hambatan fisik lainnya.

Selain itu factor koordinasi antara berbagai pihak juga menjadi hambatan karena pengangkutan kontainer melibatkan banyak pihak, mulai dari pihak kepolisian, dinas perhubungan, hingga perusahaan logistik. Kepolisian seringkali menghadapi kesulitan dalam menegakkan hukum secara tegas terhadap individu atau kelompok yang melakukan tindakan penghalangan. Masalah lain yang juga sering muncul adalah keterbatasan sumber daya, baik dalam hal jumlah personil maupun dalam hal fasilitas yang ada untuk mendukung penegakan hukum. Hal ini menjadi lebih rumit ketika aksi penghalangan melibatkan kerumunan massa yang sulit dikendalikan, sehingga resiko terjadinya gesekan fisik atau konflik dengan masyarakat meningkat. Oleh karena itu, penanganan kasus ini memerlukan pendekatan yang melibatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat serta koordinasi yang solid antara aparat keamanan dan pihak terkait lainnya

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang sudah dilakukan dalam jurnal ini, dapat disimpulkan bahwa upaya kepolisian dalam menangani perbuatan masyarakat yang menghalangi pengangkutan kontainer di jalan umum melibatkan berbagai langkah hukum, pencegahan dan penindakan yang terkoordinasi dengan instansi terkait. Fenomena penghalangan pengangkutan kontainer seringkali disebabkan oleh sejumlah faktor, baik yang bersifat individu maupun kolektif, seperti ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah, masalah sosial ekonomi, serta ketidakbantuan atau kurangnya pemahaman mengenai dampak negatif dari tindakan tersebut terhadap kelancaran arus lalu lintas dan perekonomian.

Upaya kepolisian dalam menuntaskan permasalahan ini tidak hanya dilakukan dengan tindakan represif, tetapi juga melalui langkah preventif yang lebih humanis dan edukatif. Dalam hal ini, peran komunikasi dan pendekatan langsung kepada masyarakat sangat penting untuk menciptakan pemahaman bersama mengenai dampak negatif dari tindakan tersebut. Agar masyarakat lebih sadar akan pentingnya mendukung kelancaran distribusi barang, yang pada gilirannya juga akan memberikan manfaat ekonomi bagi mereka sendiri.

Disisi lain polisi dihadapkan pada tantangan terkait keterbatasan sumber daya dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh terhadap aktivitas di jalan raya, dserta adanya

potensi konfrontasi antara masyarakat yang merasa dirugikan dan pihak kepolisian yang bertugas menegakkan hukum. Oleh karena itu, kolaborasi antara kepolisian dan pemerintah daerah serta lembaga lainnya menjadi kunci untuk menyelesaikan masalah ini secara komprehensif. Kebijakan yang lebih mengedepankan prinsip keadilan sosial, dengan memperhatikan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat sekitar, juga menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan solusi yang seimbang bagi semua pihak.

Secara keseluruhan, meskipun upaya kepolisian sudah memberikan dampak positif dalam mengurangi frekuensi kejadian penghalangan pengangkutan kontainer, namun masih terdapat sejumlah hambatan yang perlu diatasi. Oleh karena itu, upaya kepolisian dalam menuntaskan masalah ini harus didukung dengan kebijakan yang lebih holistic, pemanfaatan teknologi untuk memantau dan mengatur jalur distribusi barang, serta penguatan peran masyarakat sebagai mitra dalam menjaga ketertiban dan keamanan lalu lintas.

Hanya dengan pendekatan yang menyeluruh dan terintegrasi, masalah penghalangan pengangkutan kontainer dapat diselesaikan secara tuntas, dan diharapkan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, perekonomian dan kelancaran transportasi di jalan umum

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat. (2020). "Tantangan Pengaturan Angkutan Barang di Jalan Umum." Diakses dari <https://www.dephub.go.id> pada 22 November 2024